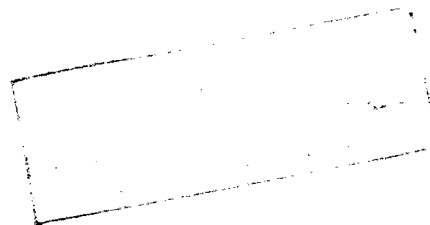


SKRIPSI

DIDIK SUSILO

TANGGUNG GUGAT PERUM PEGADAIAN ATAS HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIJADIKAN JAMINAN HUTANG



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**TANGGUNG GUGAT PERUM PEGADAIAN ATAS
HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR YANG
DIJADIKAN JAMINAN HUTANG**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Hj. Moerdiati Subagyo, S.H., M.S.

NIP. 130 287 031

Penyusun,

Didik Susilo

NIM. 039313678

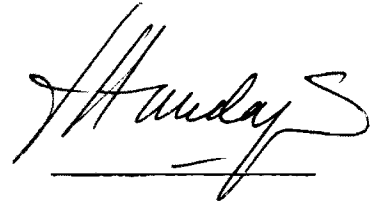
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2000

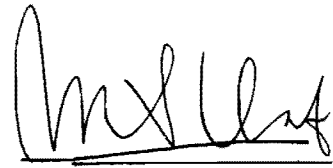
Telah diuji dihadapan Panitia Penguji pada tanggal : 10 Agustus 2000

Panitia Penguji Skripsi :

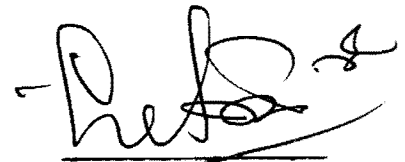
Ketua : Sri Handajani, S.H., M.Hum.



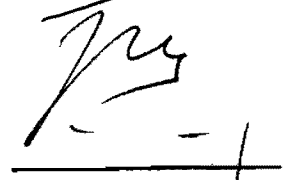
Anggota : Hj. Moerdiati Subagyo, S.H., M.S.



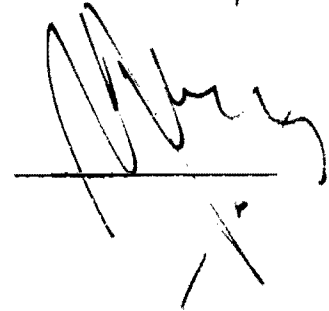
Lisman Iskandar, S.H., M.S.



Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.



BAB IV**PENUTUP****1. Kesimpulan**

- a. Didalam perjanjian utang piutang dengan jaminan di lembaga pegadaian wilayah Kotamadya Surabaya, saat terbentuknya perjanjian gadai antara Kreditor penerima gadai dengan debitor pemberi gadai adalah ketika terjadi penyerahan barang gadai dari nasabah (debitor) kepada Perum Pegadaian (Kreditor) dan disertai pemberian uang pinjaman atau piutang dari kreditor kepada debitor yang bersangkutan. Sehingga perjanjian utang piutang dengan jaminan berupa kendaraan bermotor tersebut merupakan perjanjian riil dan mengandung asas konsensual.
- b. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang menjadi barang gadai atau jaminan tersebut, maka pihak Perum Pegadaian yang bersangkutan harus bertanggung gugat. Hal ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam BW, antara lain pasal 1154, pasal 1338, pasal 1339, serta lebih

khusus didasarkan juga pada klausul Ps 6 Buku Tata Pekerjaan Perum Pegadaian.

Sedangkan bentuk tanggung gugat itu diwujudkan dalam suatu pemberian ganti rugi. Sedangkan penentuan ganti rugi terhadap kendaraan atau benda jaminan yang hilang tersebut telah ditentukan tersendiri yaitu sebesar 125% dari nilai taksiran dan diselesaikan secara kekeluargaan.

2. Saran

- a. Oleh karena perjanjian gadai merupakan perjanjian riil dan bersifat konsensual, maka seharusnya benar-benar terdapat suatu keseimbangan hak dan kewajiban diantara masing-masing pihak yang terkait.
- b. Sebaiknya memang setiap penyelesaian ganti rugi atas kendaraan atau barang gadai yang hilang dilakukan secara kekeluargaan atau musyawarah, hal ini untuk mempersingkat waktu juga memperingan biaya kedua belah pihak.

Penyelesaian dengan cara mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri setempat sekalipun dapat dilakukan,

sebaiknya ditempuh setelah para pihak benar-benar sudah tidak dapat dilakukan.